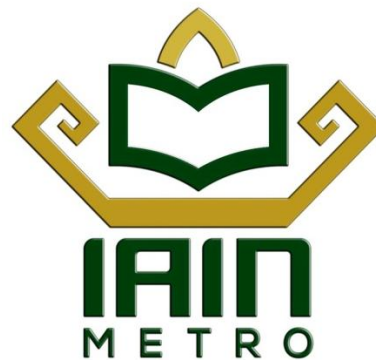


SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO
SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19**

Oleh:

**YUNITA YUSUF
NPM. 1903031050**



**Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2024 M**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO
SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)

Oleh:

YUNITA YUSUF
NPM. 1903031050

Pembimbing: Berwin Anggara, M. S. Ak., QRMA

Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Yunita Yusuf**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **YUNITA YUSUF**
NPM : 1903031050
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
METRO SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19**

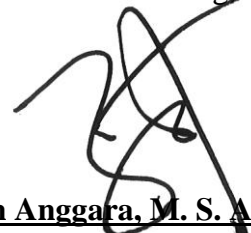
Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Desember 2023

Pembimbing,



Berwin Anggara, M. S. Ak., QRMA
NIP. 19870619 202012 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
METRO SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19**

Nama : **YUNITA YUSUF**

NPM : 1903031050

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Akuntansi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 13 Desember 2023
Pembimbing .



Berwin Anggara, M. S. Ak., ORMA
NIP. 19870619 202012 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B- 0137 /In-28.3 /D/PP-00.9 /01/2024

Skripsi dengan Judul: ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19, disusun Oleh: Yunita Yusuf, NPM: 1903031050, Jurusan: Akuntansi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Rabu/20 Desember 2023.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Berwin Anggara, M.S.Ak.,QRMA

Penguji I : Era Yudistira, M.Ak

Penguji II : Misfi Laili Rohmi, M.Si

Sekretaris : Agus Alimuddin, M.E

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Siti Zulakha, S.Ag, MH
NIP.19720611 199803 2 001

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

**Oleh:
Yunita Yusuf
NPM. 1903031050**

Analisis pada kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu informasi yang penting untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan berfungsi juga sebagai pengukur apakah sudah berhasil atau tidak pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerah yang tentunya dilakukan pula oleh pemerintah Kota Metro. Untuk beberapa Provinsi di Indonesia kinerja keuangan pemerintah daerah pada sebelum dan saat Pandemi Covid-19 ada yang mampu untuk mempertahankan kinerja keuangannya namun ada juga yang mengalami penurunan pada saat terjadinya Pandemi Covid-19.

Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini populasinya adalah laporan keuangan pada pemerintah Kota Metro. Sampel yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu sampel sebelum dan saat Pandemi Covid-19 (periode 2019-2020). Teknik analisis data menggunakan uji beda dengan *paired sampel t-test*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19. Sesuai dengan hipotesis H_0 pada uji hipotesis.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Pemerintah, Pandemi Covid-19

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNITA YUSUF

NPM : 1903031050

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Yunita Yusuf

NPM. 1903031050

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾ (سورة الإسراء, ٣٥)

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. Al-Isra: 35)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, ucapan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya sehingga dengan izin-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Keberhasilan ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya (bapak Bal Yusuf dan ibu Okta Berti) yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan yang tak pernah lelah mendo'akan keberhasilan anak-anaknya.
2. Diri saya sendiri yang telah berhasil menyelesaikan skripsi ini
3. Aak, Sejati, Duli dan dua keponakan saya yaitu Kia, Yuzi dan calon-calon ponakan saya serta calon anak-anak saya juga tidak lupa keluarga.
4. Teman-teman saya yang telah memberikan support system selama saya menyelesaikan tugas akhir ini yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu
5. Almamater saya tercinta IAIN Metro yang menjadi tempat peneliti menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT telah melimpahkan kenikmatan, baik nikmat iman, islam dan kesehatan sehingga rahmat serta hidayah-Nya, peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Metro Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19” sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan penelitian skripsi dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, Sholawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad SAW, beliauah Nabi yang patut diteladani baik perkataan maupun perbuatan beliau dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Aamiin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA Rektor IAIN Metro
2. Ibu Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Northa Idaman, M.M Ketua Prodi Akuntansi Syari’ah
4. Bapak Berwin Anggara, M. S. Ak., QRMA dosen pembimbing yang telah memberi bimbingan mengarahkan dan memberikan motivasi demi terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu.

6. Pemerintah Kota Metro yang telah mengizinkan dan membantu demi terselesaikan skripsi ini.

7. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini

Namun peneliti menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, 13 Desember 2023
Peneliti,



Yunita Yusuf
NPM. 1903031050

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Batasan Masalah.....	15
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
F. Penelitian Relevan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pemerintah Daerah	20
1. Pengertian Pemerintah Daerah.....	20
2. Fungsi Pemerintah Daerah	21
3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	21

B. Kinerja Keuangan.....	22
1. Pengertian Kinerja Keuangan	22
2. Rasio Kinerja Keuangan	23
C. Laporan Keuangan	26
1. Pengertian Laporan Keuangan	26
2. Tujuan Laporan Keuangan.....	27
D. Covid-19.....	28
E. Kerangka Pemikiran	30
F. Hipotesis Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Rancangan Penelitian	32
B. Definisi Operasional Variabel.....	32
C. Populasi dan Sampel Penelitian	33
1. Populasi	33
2. Sampel.....	33
3. Teknik Pengambilan Sampel.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data	34
E. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	41
1. Sejarah Kota Metro	41
2. Pemerintahan Kota Metro	42
3. Wilayah Kota Metro.....	42
B. Hasil Analisis Data.....	43
C. Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah.....	12
Tabel 1.2	Penelitian Relevan	16
Tabel 2.1	Pola Hubungan dan tingkat Kemandirian	23
Tabel 2.2	Kriteria Eektivitas Kinerja Keuangan	24
Tabel 2.3	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan.....	24
Tabel 4.1	Perhitungan Rasio Kemandirian	44
Tabel 4.2	Perhitungan Rasio Efektivitas	45
Tabel 4.3	Perhitungan Rasio Efisiensi.....	46
Tabel 4.4	Perhitungan Rasio Belanja Operasional	47
Tabel 4.5	Perhitungan Rasio Belanja Modal	47
Tabel 4.6	Perhitungan Rasio Pertumbuhan	49
Tabel 4.7	Perhitungan Rasio DSCR	50
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	51
Tabel 4.9	Hasil Uji Hipotesis Paired Sample T Test	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah, untuk membuat peraturan daerah, menyusun serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri.¹ Dengan menerapkan kebijakan dalam otonomi daerah maka akan membuat daerah bisa lebih mengembangkan kemampuan yang ada pada daerah.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah akan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah yang terlihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar memperoleh pengelolaan keuangan daerah yang optimal, sebaiknya dilakukan analisa pada kinerja keuangan pada pemerintah daerah. Kinerja keuangan merupakan analisa dan gambaran hasil, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan entitas dalam menjalankan aktivitas usahanya sesuai peraturan yang ada yang kemudian disajikan dalam laporan keuangan.² Analisis pada kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu informasi yang penting untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan berfungsi juga sebagai pengukur apakah sudah berhasil atau tidak pemerintah daerah dalam mengatur keuangan

¹ Dian Sukma, Annie Mustika Putri, dan Muhammad Ahyaruddin, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah” 2, no. 1 (2021): 36–44.

² Dede Hartanto Patarowo, Risal Rinofah, dan Pristin Prima Sari, “Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan” 5, no. 1 (2022): 14–35.

daerah. Dalam menganalisis kinerja keuangan maka diperlukan perhitungan rasio-rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pada awal tahun 2020 merupakan awal mula Indonesia bahkan dunia dihadapkan dengan adanya pandemi Covid-19. Wabah Covid-19 menyebar begitu cepat, pemerintah melakukan sejumlah langkah untuk melawannya, antara lain mendorong masyarakat untuk menerapkan pembatasan sosial demi menghentikan penyebaran virus. Menggunakan berbagai alat protokol kesehatan seperti menggunakan masker, *hand sanitizer*, dan lain-lain. Upaya penanganan lainnya yang dilakukan dari pemerintah yaitu dengan membuat berbagai kebijakan, termasuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah yang dilakukan tersebut seperti proses belajar mengajar dilakukan secara daring serta menerapkan *work from home* sampai dengan memberikan vaksin dengan harapan bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah terkena virus covid-19 tersebut.

Bencana yang terjadi di seluruh dunia tersebut telah mengguncang berbagai sektor kehidupan, salah satu yang terdampak ialah sektor perekonomian. Kegiatan ekonomi banyak mengalami gangguan akibat dari dampak pandemi Covid-19. Akibat dari pandemi tersebut juga banyak pelaku usaha yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat telah terjadi PHK kepada 72.983 pekerja akibat pandemi Covid-19 pada hasil survei yang dilakukan Kemnaker pada November 2021 bahkan banyak pula yang terpaksa menutup

usahanya.³ Akibat lain dari Covid-19 itu pemerintah melakukan upaya mengatasi pandemi salah satunya menyesuaikan anggaran yang ada untuk kegiatan penuntasan pandemi.

Pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan akibat dari pandemi ini, salah satunya memperkuat dasar hukum dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19. Peraturan tersebut berisi berbagai upaya penanganan Covid-19, bahkan mengubah pasal UU dan peraturan yang berhubungan dengan keuangan negara dan kesehatan sebelumnya. Salah satunya UU No. 33 Tahun 2004 yang menjelaskan terkait otonomi daerah dimana sebagai bentuk desentralisasi penyelenggaraan di danai APBD. Akibat hal tersebut APBD mengalami *refocusing* dan realokasi anggaran terutama pada pos belanja yang kegiatannya tertunda atau bisa ditunda karena pandemi.⁴ Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran yang dilakukan ini tentu akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah karena pemerintah daerah tentunya harus mengatur kembali anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya dan memfokuskan serta mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran

³ Dwi Aditya Putra, "72.983 Pekerja Kena PHK Selama Pandemi Covid-19," *Liputan 6*, last modified 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>.

⁴ Mutia Agnika, Sugih Sutrisno Putra, dan Sudradjat, "Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19," *indonesian accounting research journal* 1, no. 3 (2021): 493–503.

tersebut. Presiden RI, Joko Widodo, menerbitkan Inpres No.4/2020, yang menginstruksikan, seluruh Menteri/ Pimpinan/ Gubernur/ Bupati/ Walikota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan Covid-19. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan merealokasi dana APBN sebesar Rp62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor, untuk penanganan/pengendalian Covid-19, perlindungan sosial (social safety net) dan insentif dunia usaha. APBD juga diharapkan di-refocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut.⁵

Pada saat itu pemerintah menjadi satu-satunya kendaraan pertumbuhan ekonomi yang bekerja ditengah hantaman pandemi pada berbagai aspek ekonomi. kebijakan fiskal tidak hanya memberi kontribusi pada komponen Konsumsi Pemerintah dalam PDB, tapi juga termasuk mencegah konsumsi dan investasi tidak jatuh terlalu dalam. Melalui pelebaran defisit APBN 2020 hingga 6,1% PDB, realisasi belanja negara Rp2.589,9 triliun, termasuk realisasi PEN Rp579,8 triliun, negara hadir mencegah kontraksi ekonomi lebih dalam akibat pandemi di 2020.⁶ Melalui program PEN, Pemerintah berupaya untuk mengintegrasikan berbagai langkah untuk meminimalisir dampak dari Covid-19 terhadap ekonomi, baik di tingkat individu/rumah tangga hingga korporasi. Secara umum, terdapat 6 kebijakan utama program PEN, yakni penanganan kesehatan, perlindungan sosial, insentif bagi dunia usaha,

⁵ Dedy Sasongko, "Kebijakan Fiskal Dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19," *Kementerian Keuangan*, last modified 2020, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>.

⁶ "Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Di Indonesia," *Kementerian Keuangan*, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/pengaruhcovid>.

dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pembiayaan korporasi, serta program sektoral Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk menjangkau secara luas dan komprehensif, program PEN juga melibatkan peranan Pemerintah Daerah, seperti melalui tambahan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp5T. Di samping itu, dukungan kepada Pemda juga berupa DAK Fisik dengan total Rp8,7 triliun untuk mendorong pembangunan fisik yang dapat menyerap tenaga kerja, memberdayakan masyarakat lokal, serta dilakukan secara swakelola. Selanjutnya, Pemerintah juga memperluas alternatif pendanaan bagi Pemda dalam bentuk pinjaman daerah sebesar Rp10 triliun, yang disalurkan melalui PT SMI. Sektor pariwisata dan perumahan merupakan dua di antara sektor yang langsung terpuak oleh pandemi, dan oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan stimulus untuk keduanya, masing-masing sebesar Rp3,8 triliun dan Rp1,3 triliun. Stimulus untuk sektor pariwisata diberikan melalui mekanisme hibah, kompensasi pajak hotel/restoran, serta insentif tiket untuk 10 destinasi pariwisata. Sementara insentif sektor perumahan disalurkan melalui Subsidi Selisih Bunga (SSB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.⁷

Sebagai contoh dari implementasi dari stimulus dana PEN ialah pada Kabupaten Banyumas, Pemkab Banyumas mengajukan pinjaman dana PEN tahun 2021 kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Pemkab Banyumas mengajukan pinjaman sekitar Rp. 200M untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sektor pariwisata, pada akhirnya dana yang

⁷ “Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” *Kementerian Keuangan*, accessed June 7, 2023, <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>.

disetujui sebesar Rp. 191,92M. Dana tersebut digunakan untuk membangun sejumlah objek wisata baru, seperti Menara Pandang “Teratai” dan Madhang Maning Park dan juga mengembangkan Taman Bale Kemambang yang saat sekarang dikenal dengan Taman Mas Kemambang. Sejak destinasi wisata tersebut dibuka, jumlah wisatawan yang berkunjung cukup banyak. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Menara Teratai pada hari-hari biasa bisa mencapai 1.000 orang, sedangkan pada hari Minggu atau libur mencapai kisaran 3.000 orang. Pada musim liburan sekolah dan Lebaran 2022, tiga objek wisata milik Pemkab Banyumas yang terdiri atas Lokawisata Baturraden, Menara Teratai, dan Taman Mas Kemambang, mampu menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) sebanyak Rp400 juta, sedangkan pada hari-hari biasa berkisar Rp60 juta hingga Rp80 juta.⁸ Adapun yang dikatakan oleh Ketua Komisi III, Emy Wahyuni saat dikonfirmasi media usai menggelar rapat evaluasi bersama Bapenda dan BPKAD, realisasi PAD Banyuwangi pada tahun 2022 sebesar Rp. 516,2M.⁹ Dampak dari PAD ini, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi pada tahun 2022 berdasarkan BPS sebesar 4,43%.¹⁰ Hal ini dapat menunjukkan bahwa, karena adanya pertumbuhan PAD yang merupakan salah satu pemicunya adalah dari peningkatan sektor wisata.

⁸ Sumarwoto, “Banyumas Bangkit Melalui Sektor Pariwisata,” *Antaraneews*, last modified 2022, accessed June 21, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3290779/banyumas-bangkit-melalui-sektor-pariwisata>.

⁹ Huma DPRD Banyuwangi, “PAD Banyuwangi 2022 Turun 4,75 Persen, Komisi III Dorong Eksekutif Gali Potensi PAD Di 2023,” *Filesatu*, last modified 2023, accessed June 21, 2023, <https://filesatu.co.id/pad-banyuwangi-2022-turun-475-persen-komisi-iii-dorong-eksekutif-gali-potensi-pad-di-2023/>.

¹⁰ Oryza A. Wirawan, “Pertumbuhan Ekonomi Jember Salip Banyuwangi,” *Berita Jatim*, last modified 2023, accessed June 21, 2023, <https://beritajatim.com/sorotan/pertumbuhan-ekonomi-jember-salip-banyuwangi/>.

Selain itu, untuk mengatasi ekonomi yang menurun akibat dari Pandemi Covid-19 pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan untuk fokus mengarahkan pendapatan dan pengeluaran dana di Indonesia supaya ekonomi tidak bertambah jatuh terlalu dalam, yang pastinya akan berpengaruh besar pada kinerja keuangan daerah. Lembaga pemeringkat Fitch Ratings dalam laporan terbarunya menyebutkan, defisit APBN 2020 berpotensi melebar dari target 1,74 persen produk domestik bruto (PDB) menjadi 2,5 persen PDB. Pelebaran defisit dipengaruhi tiga faktor utama, yakni perlambatan pertumbuhan ekonomi, wabah Covid-19, dan pendapatan yang lesu akibat perluasan basis pajak tidak optimal.¹¹ Maka dari itu, pemerintah melalui pelebaran defisit hadir untuk mencegah terjadinya kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 guna untuk memberi stimulus pada perekonomian, agar perekonomian bisa kembali bangkit dan stabil. Kebijakan fiskal *extraordinary* melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 memberikan keleluasaan pelebaran defisit anggaran melebihi 3% terhadap PDB sampai dengan tahun 2022. Kebijakan pelebaran defisit diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, meliputi aspek kesehatan, perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, serta dukungan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang

¹¹ Karina Isna Irawan, "Hadapi Risiko, Defisit Anggaran Diperlebar," *Kompas*, last modified 2020, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/02/28/hadapi-risiko-defisit-anggaran-diperlebar/>.

disinergikan dengan langkah realokasi dan *refocusing* APBN.¹² Dari Perppu tersebut Pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri, memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. Selain itu pemerintah juga punya kewenangan untuk memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dan/atau melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.¹³ Dikeluarkannya Perppu tersebut disertai dengan paket stimulus sebesar Rp. 405,7T agar dapat dilakukan langkah yang cepat dan antisipatif untuk menangani Covid-19 serta dampaknya pada stabilitas ekonomi dan sektor keuangan.

Pada penelitian Wulan Dri Puspita dan Dyah Ani Pangastuti yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 yang berlokasi di Kota Batu, pertumbuhan pendapatan dari Pemkot Batu pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019. Tingkat kemandirian Pemkot Batu secara finansial masih di dominasi oleh peran pemerintah pusat. Tingkat efektivitas kinerja pendapatan mengalami kenaikan.

¹² “RAPBN TA 2022: Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural,” *Kementerian Keuangan*, last modified 2021, <https://anggaran.kemenkeu.go.id/IN/post/rapbn-ta-2022-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural>.

¹³ Cantika Adinda Putri, “DPR: Perppu Pelebaran Defisit Di Atas 3% Bisa Langsung Jalan,” *CNBC Indonesia*, last modified 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200402115240-4-149330/dpr-perppu-pelebaran-defisit-di-atas-3-bisa-langsung-jalan>.

Untuk tingkat efisiensi berada dikategori efisien. Tingkat keserasian belanja masih didominasi oleh belanja operasi, walaupun terjadi penurunan pada belanja modal. Sedangkan untuk tingkat ekonomis masih bisa dikatakan baik.¹⁴

Pada Kabupaten Subang melalui penelitian dari Mutia Agnika, Sugih Sutrisno Putra dan Sudrajat yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Subang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 tahun 2021. Dalam penelitian tersebut kinerja APBD Kabupaten Subang dari tingkat kemandirian masih menunjukkan rendah sekali dikarenakan turunnya anggaran dan realisasi PAD serta berkurangnya pendapatan transfer akibat Covid-19. Rasio efektivitas PAD tahun 2019 sebesar 95,12% naik menjadi 98,77% tahun 2020. Rasio efisiensi pada tahun 2019 menunjukkan tidak efisien, lalu tahun 2020 menjadi efisien. Berdasarkan rasio keserasian proporsi belanja operasi masih batas wajar, begitu pula belanja modal. Sedangkan berdasarkan rasio pertumbuhan mengalami penurunan hampir pada seluruh pos APBD dari tahun sebelumnya.¹⁵

Pada Provinsi Papua, dalam penelitian Wa Ariadi dan Windi Jatmika yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Berdasarkan analisis desentralisasi fiskal dari tahun 2018-2020 menunjukkan bahwa pemerintah daerah pada tingkat desentralisasi fiskal masih sangat kurang dimana PAD

¹⁴ Wulan Dri Puspita dan Dyah Ani Pangastuti, "Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19," *Among Makarti* 15, no. 1 (2022): 90–104.

¹⁵ Agnika, Putra, dan Sudradjat, "Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19."

merupakan aspek yang menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Hasil analisis kemandirian keuangan dari tahun 2018-2020 berkisar antara 21,28-25,21. Hasil indeks kemampuan rutinnya menunjukkan proporsi kemampuan belanja rutin dari tahun 2018-2020 mencapai 11,31-13,72, artinya kemampuan PAD membiayai belanja rutin masih dibawah 20% dari total belanja pemerintah daerah Provinsi Papua. Sedangkan proporsi perkembangan untuk belanja rutin ditahun 2020 cukup signifikan dan total belanja pemerintah daerah Provinsi Papua justru mengalami peningkatan dimasa pandemi, demikian dengan proporsi perkembangan PAD.¹⁶

Pada Kota Semarang, dalam penelitian Nifsi Nova Karina dan Puji Wibowo yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Dalam penelitian tersebut dapat dilihat pada rasio derajat otonomi fiskal cenderung naik. Rasio kemandirian mengalami kenaikan terus setiap tahunnya dari tahun 2018-2021. Rasio efektivitas pada tahun 2018 dan tahun 2019 menurun sampai tahun 2020. Pada tahun 2020 efektivitas realisasi pendapatan asli daerah turun tetapi naik dengan angka yang cukup pada tahun 2021. Rasio efisiensi pada tahun 2018 terus menurun sampai tahun 2020. Tetapi rasio ini naik kembali pada tahun 2021. Berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa

¹⁶ Wa Ariadi dan Windi Jatmika, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 12 (2023): 11–15.

rasio keserasian antara belanja langsung dan tidak langsung dari pemerintah daerah cukup berfluktuatif.¹⁷

Penelitian dari M. Ichlasul Amal dan Puji Wibowo pada tahun 2022 mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah pandemi covid-19. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan perhitungan rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19. Rasio yang digunakan ada 5 yaitu rasio kemandirian daerah, efektifitas dan efisiensi, aktivitas, pertumbuhan dan rasio DSCR. Hasil dari penelitian tersebut, Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama, walaupun rasio aktivitas belanja modal mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2020 dan rasio pertumbuhan belanja modal mengalami *minus growth* selama pandemi Covid-19 sebesar 18,18%.¹⁸

Berdasarkan dari beberapa penelitian diatas dapat dilihat bahwa banyak daerah-daerah yang mengalami penurunan terlebih pada dana PAD nya yang diakibatkannya dari Pandemi Covid-19. Memang tidak semua daerah mengalami penurunan PAD, ada juga beberapa yang mampu untuk mempertahankan PAD daerah masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akibat dari dampak Pandemi Covid-19 pada pemerintahan berpengaruh terhadap naik turunnya PAD dari setiap daerah-daerah.

¹⁷ Nisfi Nova Karina dan Puji Wibowo, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 14, no. 2 (2022): 146–167.

¹⁸ Muhammad Ichlasul Amal dan Puji Wibowo, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 4, no. 1 (2022): 83–93.

Untuk Lampung sendiri, Pemprov Lampung mengalirkan anggaran penanganan Covid-19 sejak maret 2020 sebesar Rp. 246M. Dari jumlah tersebut terserap Rp. 130M sampai september 2020 atau 52%. Berdasarkan Surat Gubernur Lampung Nomor 900/1210/VI.01/2020 tentang Laporan Alokasi APBD Provinsi Lampung 2020 untuk Penanganan Covid-19. Dalam surat tersebut disebutkan penanganan Covid-19, Pemprov Lampung mengalokasikan anggaran Rp 246 miliar. Rincian anggaran Covid-19 yakni yakni penanganan kesehatan Rp 181 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp 26,9 miliar, penyediaan jaring pengaman sosial Rp 17,7 miliar, serta untuk RS Bandar Negara Husada dan RSUD Abdul Moeloek Lampung Rp 20,4 miliar. Serapan anggaran penanganan Covid-19 tersebut yakni sektor pemulihan kesehatan 27,30%, pemulihan ekonomi 13,13%, dan jaring pengaman sosial 11,58%.¹⁹

Selanjutnya, berdasarkan data dari laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang di publikasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui websitenya, untuk Kota Metro

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

	2019	2020
PAD	Rp. 176,19 M	Rp. 221,64 M
Pendapatan Transfer	Rp. 733,73 M	Rp. 677,88 M
Belanja Operasi	Rp. 692,94 M	Rp. 753,54 M
Belanja Modal	Rp. 209,52 M	Rp. 166,89 M

Berdasarkan data tersebut, realisasi pendapatan APBD dari Kota Metro tahun anggaran 2020 mencapai Rp. 917,9 M sedangkan untuk belanja Rp.

¹⁹ "Anggaran Covid-19 Di Lampung Terserap 52%," *BPKAD Provinsi Lampung*, last modified 2020, <https://bpkad.lampungprov.go.id/anggaran-covid-19-di-lampung-terserap-52-persen/>.

946,1 M sehingga mengalami defisit yang terlihat dari dana belanja lebih besar dari pada pendapatan daerah pada tahun 2020.²⁰ Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah Kota Metro dalam pengelolaan dana anggaran tersebut. Sehingga, pemerintah pastinya akan lebih rutin dalam memantau anggaran dan membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk mengatasi defisit tersebut. Walaupun begitu Pemerintah Kota Metro mampu mempertahankan PAD bahkan mengalami kenaikan pada PAD pada saat Pandemi Covid-19 yang dimana pada masa itu banyak dari daerah-daerah lain yang mengalami penurunan pada PAD daerahnya.

Selain itu, kinerja keuangan pemerintah daerah juga banyak mendapatkan perhatian dari sejumlah peneliti. Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti yang dilakukan oleh Agus Tri Sulistyono (2018), Cici Dewi S.R. (2020), dan Heri Faisal Harahap pada tahun 2020 mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, penelitian tersebut menggunakan beberapa rasio seperti rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio efektivitas untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian tersebut yaitu, kinerja keuangan pemerintah daerah tapanuli tengah secara umum bisa dikatakan cukup baik, walaupun rasio derajat desentralisasi masih tergolong rendah.²¹ Ada pula Penelitian berikutnya dari M. Nur Salim tahun 2019, menjelaskan terkait bagaimana kinerja keuangan sebelum dan setelah terjadinya pemekaran

²⁰ "APBD 2020," *BPKAD Kota Metro*, <https://bpkad.metrokota.go.id/apbd-2020/>.

²¹ Heri Faisal Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah," *Ekonomis: Journal of Economics dan Business* 4, no. 1 (2020): 34–38.

yang studi kasusnya pemekaran di Papua. Setelah dilakukan perhitungan rasio-rasio dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu terlihat signifikan perbedaannya pada periode sebelum dan sesudahnya. Kecuali nilai dari pertumbuhan PDRB pada Kabupaten Puncak Jaya yang mengalami penurunan yang tajam dari sebelum pemekaran.²²

Mengamati penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah masih cukup relevan, hal ini dikarenakan terdapat perkembangan-perkembangan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara pada masa Covid-19. Dengan demikian, penelitian ini masih dikatakan relevan dengan penelitian-penelitian lainnya yang membandingkan kinerja keuangan daerah pada saat Covid-19. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA Metro SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi bahwa: Terjadi perubahan pada kinerja keuangan pemerintah kota Metro pada saat Pandemi Covid-19 periode 2019-2020.

²² Muhamad Nur Salim, “Analisis Kinerja Keuangan Dan Ekonomi Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Pemekaran (Studi Kasus Pemekaran Di Papua),” *Indonesian Journal of Development Economics* 2, no. 2 (2019): 436–448.

C. Batasan Masalah

Agar menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan pemkot Metro sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Adakah perbedaan kinerja keuangan pemkot Metro sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisa kinerja keuangan pemkot Metro sebelum dan pada saat Pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Memberikan manfaat penelitian secara teoritis terhadap pengembangan ilmu ekonomi khususnya dibidang akuntansi, serta mampu sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

Memberikan manfaat penelitian secara praktis dibidang akuntansi bagi peneliti agar dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

Mampu memberikan manfaat pula berupa evaluasi untuk Pemerintah Kota Metro.

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan ialah penelitian yang dilakukan terdahulu, seperti

Tabel 1.2 Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ichlasul Amal dan Puji Wibowo, 2022	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Walaupun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi Covid-19. ²³ Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang analisis kinerja keuangan pemerintah sebelum dan pada saat pandemi covid-19. Sedangkan perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian relevan hanya menggunakan indicator rasio untuk teknik analisis data dalam penelitian, sedangkan peneliti menambahkan uji normalitas dan uji hipotesis untuk teknik analisis data dalam penelitian.
2.	Heri Faisal Harahap, 2020	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum dikatakan cukup baik, walaupun rasio

²³ Ichlasul Amal dan Wibowo, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19."

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Tapanuli Tengah	derajat desentralisasi masih tergolong rendah, ketergantungan. ²⁴ Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian relevan hanya membahas kinerja keuangan pemerintah saja, sedangkan peneliti membahas kinerja keuangan sebelum dan saat pandemi covid-19.
3.	Cici Dewi Sari Murni, 2020	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002 (Studi Terhadap Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang sudah diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan agar semakin tinggi setelah ditetapkannya Kepmendagri no.29 tahun 2002, namun kinerja keuangan pemerintah daerah aceh tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan pemerintah aceh belum mampu meningkatkan penerimaan APBD, masih tinggi tingkat ketergantungan, dan belum maksimalnya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. ²⁵ Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kinerja keuangan pemerintah dan sama-sama meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan pemerintah dalam suatu periode.

²⁴ Harahap, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah."

²⁵ Cici Dewi Sari Murni, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 (Studi Terhadap Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)," *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)* 5, no. 29 (2020): 172–186.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Sedangkan perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian relevan meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan pemerintah Sebelum dan Setelah Ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 tahun 2002, sedangkan peneliti meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan pemerintah Sebelum dan saat pandemi covid-19.
4.	Muhamad Nur Salim, 2008	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dan Setelah Pemekaran (Studi Kasus Pemekaran di Papua)	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, nilai derajat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan PDRB perkapita tidak mengalami perbedaan yang signifikan kecuali nilai pertumbuhan PDRB pada kabupaten Puncak Jaya yang mengalami penurunan yang tajam, sedangkan nilai tingkat kemiskinan yang terdapat perbedaan yang signifikan. ²⁶ Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kinerja keuangan pemerintah dan sama-sama meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan pemerintah dalam suatu periode. Sedangkan perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian relevan meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan pemerintah Sebelum dan Setelah pemekaran dengan studi kasus pemekaran di Papua, sedangkan peneliti meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan pemerintah

²⁶ Salim, "Analisis Kinerja Keuangan Dan Ekonomi Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Pemekaran (Studi Kasus Pemekaran Di Papua)."

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			sebelum dan saat pandemi covid-19 pada Kota Metro.
5.	Nila Gemala, Arles Tanno, dan Rahmat Kurniawan, 2020	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan dan Nilai Perusahaan Antara Pra Tax Amnesty dengan Pasca Amnesty di Indonesia	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio likuiditas dari penelitian kinerja keuangan perusahaan tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Sedangkan, pada rasio profitabilitas membuktikan adanya perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudahnya.²⁷</p> <p>Persamaan penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas tentang kinerja keuangan dan sama-sama meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan suatu periode. Sedangkan perbedaan antara penelitian relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian relevan meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan perusahaan antara Pra Tax Amnesty dengan Pasca Amnesty di Indonesia, sedangkan peneliti meneliti terkait perbandingan kinerja keuangan pemerintah sebelum dan saat pandemi covid-19.</p>

²⁷ Nila Gemala, Aries Tanno, dan Rahmat Kurniawan, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Nilai Perusahaan Antara Pra Tax Amnesty Dengan Pasca Tax Amnesty Di Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics dan Business* 6, no. 1 (2022): 69–77.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemerintah Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Menurut UU No 23 tahun 2014 ayat 2 pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Selanjutnya dalam ayat 3 pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen pada bab ke-6 pasal 18 ayat 3 dikatakan bahwa pemerintah daerah provinsi kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang Di mana para anggotanya dipilih melalui pemilu. Selanjutnya, Pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintah daerah beserta DPR daerah sehingga pemerintahan daerah provinsi adalah Gubernur beserta DPRD provinsi sedangkan pemerintahan daerah kabupaten atau kota adalah bupati atau walikota beserta DPRD kabupaten atau kota.¹

Pemerintah daerah juga disebut dengan otonomi daerah. Yang secara harfiah atau etimologi, otonomi daerah berasal dari kata “otonom” dan “daerah”. Dalam bahasa Yunani, otonom berasal dari kata *autos* yang

¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintah Daerah : Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

artinya sendiri dan *namos* yang artinya aturan atau undang-undang. Jadi otonomi daerah ialah kewenang untuk mengatur sendiri atau kewenangan membuat aturan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Seperti pengertian dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

2. Fungsi Pemerintah Daerah

Dalam UUD 1945 Bab VI Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan secara umum bagaimana pemerintah daerah berfungsi dalam pembangunan dan pemerintahan negara, sebagai berikut:³

- a. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
- b. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat oleh UU
- c. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan juga peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan

3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dijelaskan pada UUD 1945 Bab VI Pasal 18A bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah ialah:⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

- a. Hubungan wewenang yang diatur oleh UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah
- b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya yang diatur dan dilaksanakan dengan adil dan selaras berdasarkan UU

B. Kinerja Keuangan

1. Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Sukhemi, Kinerja dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Jumingan, kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya.⁵ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang menggambarkan keadaan suatu perusahaan yang menyangkut banyak aspek seperti keuangan, pemasaran, SDA, dan lain lain dalam periode tertentu.

Menurut Fahmi, kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Sedangkan

⁴ *Ibid.*

⁵ Anton Trianto, "Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) TBK Tanjung Enim," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 03 (2017).

menurut Mulyadi, kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, kriteria yang ditetapkan sebelumnya.⁶ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah pencapaian hasil perusahaan pada suatu periode atas berbagai aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan untuk menggambarkan kesehatan keuangan.

2. Rasio Kinerja Keuangan

Rasio-rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan dari APBD yaitu:⁷

- a. Rasio kemandirian memaparkan terkait tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal yang ditunjukkan dengan perhitungan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain.

Rumus untuk mengitung rasio kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman(Pendapatan Daerah)}}$$

Tabel 2.1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian

Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan		
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

⁶ *Ibid.*

⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 3. (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

- b. Rasio efektivitas memaparkan terkait kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan kemudian disandingkan dengan target yang disetujui berdasarkan potensi nyata daerah. Rasio efisiensi memaparkan terkait perbedaan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus untuk menghitung rasio efektivitas dan efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Efektivitas Keuangan daerah	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup Efektif
60%-80%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Efektivitas Keuangan daerah	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

- c. Rasio aktivitas menjelaskan terkait strategi pemerintah daerah dalam mementingkan alokasi dana untuk belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Tidak ada tolak ukur pasti yang menjelaskan rasio ideal belanja operasional dan belanja modal terhadap belanja daerah, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang dibutuhkan.

Rumus untuk menghitung rasio aktivitas adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- d. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif.

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah:

$$\% \text{ Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Dimana:

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang di hitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang di hitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

- e. *Debt Service Coverage Ratios*, Rasio DSCR adalah perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan bagian

daerah, pendapatan sumber daya alam dan bagian lain dari daerah serta dana alokasi umum setelah dikurangi pengeluaran wajib, yang dibandingkan dengan jumlah total hutang pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang habis tempo.

Rumus untuk menghitung rasio DSCR adalah:

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{\text{Total(Pokok Utang+Bunga+Biaya Pinjaman)}}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari bagi hasil pajak/bukan pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

C. Laporan Keuangan

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Munawir adalah laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Menurut IAI laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan-catatan dan berbagai integral dari laporan keuangan. Menurut Kasmir dalam praktiknya laporan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau

standar yang berlaku. Hal ini dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Psak No 1 laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Jadi laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang sangat penting dalam menilai perkembangan perusahaan.⁸ Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan hasil dari pelaporan keuangan yang disajikan dengan terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas dengan aturan dan standar yang berlaku.

Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi unsur karakteristik yaitu, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010.⁹

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Kasmir:¹⁰

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

⁸ Helmi Herawati, "Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ* 2, no. 1 (2019): 16–25.

⁹ Sardo Kartopawiro dan Yohanes Susanto, "Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas," *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 16, no. 4 (2018): 1–14.

¹⁰ Trianto, "Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) TBK Tanjung Enim."

- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- h. Informasi keuangan lainnya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan.¹¹

D. Covid-19

Menurut *World Health Organization* (WHO), Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* yang baru ditemukan. Wabah virus ini dimulai dari Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019.¹² Presiden Republik Indonesia mengumumkan awal mula peristiwa Covid-19 di Indonesia tertanggal 2 Maret 2020. Pada akhir Desember 2020, akumulasi kasus positif Covid-19 di Indonesia berjumlah

¹¹ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: UII Pess Yogyakarta, 2011).

¹² "Pertanyaan Jawaban Terkait COVID-19 Untuk Publik," *WHO*, accessed June 26, 2023, [https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public#:~:text=Virus COVID-19 \(disebut juga,pemutakhiran jika temuan baru tersedia.](https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public#:~:text=Virus COVID-19 (disebut juga,pemutakhiran jika temuan baru tersedia.)

743.198 pada Kamis (31/12). Diantaranya terdapat kasus sembuh 611.097 dan kasus kematian 22.138. Selain itu, Indonesia juga masih memiliki 109.963 kasus aktif yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau diharuskan isolasi mandiri.¹³ Dikarenakan hal tersebut upaya yang diambil oleh pemerintah pusat (Pempus) dibantu pemerintah daerah (Pemda) dengan membuat berbagai kebijakan, termasuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pengertian pandemi covid 19 menurut situs itjen Kemendikbud adalah wabah yang terjadi secara serempak meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi juga merupakan penyakit menular (epidemi) yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua dan Biasanya mengenai banyak orang.¹⁴

Pemerintah memperkuat dasar hukum penanganan pandemi Covid- 19 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diana 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Peraturan tersebut memuat berbagai kebijakan baru sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19, bahkan mengubah beberapa pasal undang-undang dan

¹³ “Tutup 2020, Positif Covid-19 Di RI 743.198, Meninggal 22.138,” *CNN Indonesia*, last modified 2021, accessed June 26, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210101081932-20-588397/tutup-2020-positif-covid-19-di-ri-743198-meninggal-22138>.

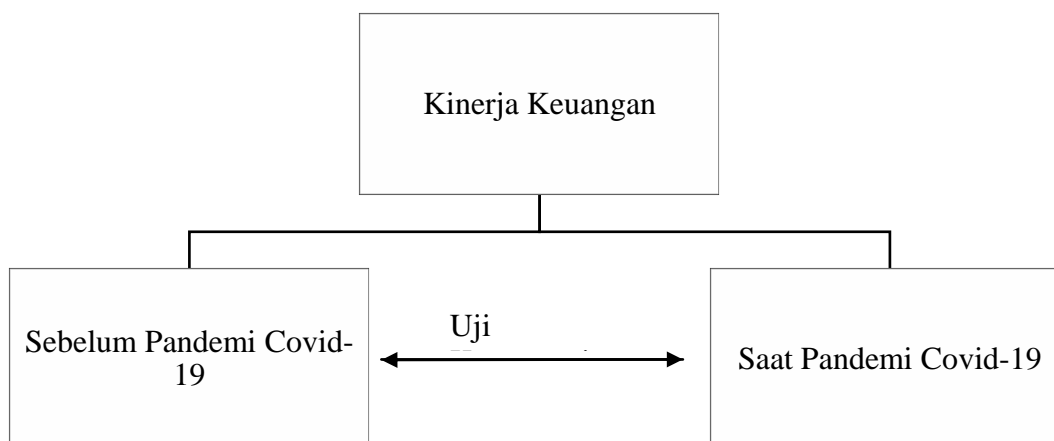
¹⁴ Kanya Anindita Mutiarasari, “Pengertian Pandemi Covid-19, Statusnya Di Indonesia Diperpanjang Jokowi,” *Detiknews*, last modified 2022, accessed July 3, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-diperpanjang-jokowi>.

peraturan yang berhubungan dengan keuangan negara dan kesehatan sebelumnya.¹⁵

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.¹⁶

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

¹⁵ Agnika, Putra, dan Sudradjat, “Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19.”

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 19th ed. (Bandung: ALFABETA, 2013).

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian masalah yang didasarkan atas teori yang relevan.¹⁷ Berdasarkan dari kajian penelitian sebelumnya, kajian teoritis dan rumusan masalah. Maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

H₀: Tidak terdapat perbedaan pada kinerja keuangan pemerintah kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19

H₁: Terdapat perbedaan pada kinerja keuangan pemerintah kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19

¹⁷ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2013).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Disebut penelitian kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif sendiri dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁴⁵

Berdasarkan dari sumber data yang akan menjadi analisis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini akan diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Metro.

B. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variable yang akan digunakan yaitu variable independent atau variable yang mempengaruhi variable dependen dan variable dependen atau variable yang dipengaruhi oleh variable independent. Variable independent dalam penelitian ini yaitu Pandemi Covid-19 sedangkan variable dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁴⁶ Dalam penelitian ini populasinya adalah laporan keuangan pada pemerintah Kota Metro periode 2019-2020.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁴⁷ Sampel yang diambil oleh peneliti untuk penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran sebelum dan saat Pandemi Covid-19 (periode 2019-2020).

3. Teknik Pengambilan Sampe

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu teknik purposive sampling atau pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara sengaja menyesuaikan dengan tujuan penelitian. Jadi sampel dalam penelitian ini yaitu laporan realisasi anggaran Pemerintah Kota Metro sebelum dan saat Pandemi Covid-19 pada tahun 2019-2020

⁴⁶ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disentrasi*.

⁴⁷ *Ibid.*

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data terdapat dua hal utama yang mempengaruhi data hasil penelitian yaitu, kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting* (*setting* alamiah, metode eksperimen, reponden, dan lain-lain), sumber (primer dan sekunder), dan cara (wawancara, angket, pengamatan, dan gabungan ketiganya).⁴⁸ Sumber data yang digunakan dalam penelitian menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan laporan keuangan pemerintah daerah Kota Metro sebelum dan saat Pandemi Covid-19 periode 2019-2020.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu uji beda dengan *paired sampel t-test*. Paired sampel t-test adalah salah satu metode pengujian hipotesis dimana data yang digunakan berpasangan.⁴⁹ Uji beda ini digunakan untuk membandingkan dua variable untuk sampel tunggal dan mencari atau menghitung nilai selisih antara nilai variable untuk tiap kasus.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang di uji beda t-test yaitu kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro sebelum dan saat Pandemi Covid-19.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

⁴⁹ Nuryadi et al., *Dasar - Dasar Statistik Penelitian* (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017).

⁵⁰ Wahana Komputer, *Seri Panduan Praktis: SPSS 17 Untuk Pengelolaan Data Statistik*, ed. Ari Pidekso (Semarang: Andi Offset, 2009).

1. Analisis Indikator Rasio

Analisis indikator rasio terhadap seluruh data penelitian menggunakan 5 analisis rasio, yaitu:

- a. Rasio kemandirian memaparkan terkait tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal yang ditunjukkan dengan perhitungan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Jika level ketergantungan daerah terhadap bantuan eksternal semakin rendah maka dapat diyakini bahwa rasio kemandiriannya akan semakin tinggi dan sebaliknya.

Rumus untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}(\text{Pendapatan Daerah})}$$

- b. Rasio efektivitas memaparkan terkait kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan kemudian disandingkan dengan target yang disetujui berdasarkan potensi nyata daerah. Rasio efisiensi memaparkan terkait perbedaan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumus untuk menghitung rasio efektivitas dan efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

- c. Rasio aktivitas menjelaskan terkait strategi pemerintah daerah dalam mementingkan alokasi dana untuk belanja operasional dan belanja modal secara optimal. Tidak ada tolak ukur pasti yang menjelaskan rasio ideal belanja operasional dan belanja modal terhadap belanja daerah, karena sangat dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan dan besarnya investasi yang dibutuhkan.

Rumus untuk menghitung rasio aktivitas adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

- d. Rasio pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kinerja anggaran pemerintah daerah mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Tujuan dari rasio ini untuk mengukur besaran masing-masing pos penerimaan dan pengeluaran yang hasilnya dapat digunakan untuk mengutamakan potensi kedepannya.

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah:

$$\% \text{ Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Dimana:

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang di hitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang di hitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

- e. *Debt Service Coverage Ratios*, Rasio DSCR adalah perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah, pajak bumi dan bangunan bagian daerah, pendapatan sumber daya alam dan bagian lain dari daerah serta dana alokasi umum setelah dikurangi pengeluaran wajib, yang dibandingkan dengan jumlah total hutang pokok, bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang habis tempo. Ukuran minimum DSCR adalah 2,5.

Rumus untuk menghitung rasio DSCR adalah:

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{Total(Pokok Utang+Bunga+Biaya Pinjaman)}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari bagi hasil pajak/bukan pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

2. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka dapat digunakan untuk uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka menggunakan uji statistik non-parametrik.⁵¹

Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah *one sampel kolmogorov-smirnov test*. Pengujian ini lebih sering digunakan

⁵¹ Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*, ed. Fandy Hutari, 2nd ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

untuk membandingkan dua fungsi distribusi kumulatif, yaitu fungsi distribusi kumulatif yang teramati dan fungsi distribusi kumulatif yang dihipotesiskan. Data yang digunakan yaitu data kuantitatif dengan skala pengukuran interval atau rasio. Jika nilai dari sig. > 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Sedangkan, jika nilai dari sig. < 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.⁵² Uji normalitas digunakan untuk menentukan analisa yang akan digunakan dalam uji hipotesis.

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah bagian atau ruang lingkup ilmu statistik inferensi. Statistik yang berkenaan dengan pemodelan data dan pengambilan keputusan berdasarkan data.⁵³

a. Uji Beda *t*-test sampel berhubungan (*Paired Sampel T Test*)

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji beda *t*-test dengan sampel berhubungan, yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel yang berhubungan. Uji *T* sampel berhubungan adalah prosedur yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel tunggal. Perbandingan ini untuk mencari atau menghitung nilai selisih antara nilai dua variabel untuk setiap kasus. Data untuk uji ini berasal dari dua ukuran dari subjek yang sama atau satu ukuran dari pasangan subjek. Dengan melakukan prosedur tersebut, maka akan

⁵² Komputer, *Seri Panduan Praktis: SPSS 17 Untuk Pengelolaan Data Statistik*.

⁵³ *Ibid.*

menghasilkan statistik deskriptif untuk setiap variabel yang diuji korelasi pearson antara tiap pasangan dan nilai signifikansinya dan selang kepercayaan untuk selisih rata-rata.⁵⁴ Alasan yang digunakan adalah untuk mengetahui terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan sebelum dan saat Pandemi Covid-19 pada uji t-test. Langkah-langkah sebagai berikut:

1) Hipotesis

H_0 : Tidak terdapat perbedaan pada kinerja keuangan pemerintah Kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19

H_1 : Terdapat perbedaan pada kinerja keuangan pemerintah Kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19

2) Menentukan taraf signifikansi, taraf signifikansi pada penelitian ini 5% atau 0,05

3) Memperoleh nilai signifikansi

4) Daerah kritis

Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_1 ditolak

5) Membandingkan signifikansi

6) Menarik kesimpulan

b. *Uji Non-Parametrik*

Uji non parametrik adalah alternatif untuk memenuhi validitas berdasarkan asumsi-asumsi umum. Statistik non-parametrik digunakan

⁵⁴ *Ibid.*

untuk pengujian populasi yang harus dilakukan tanpa ketergantungan pada asumsi-asumsi kaku yang bersifat khusus. uji ini digunakan sebagai alternatif dari prosedur uji parametrik yang menghasilkan data yang tidak berdistribusi normal. Data yang digunakan berupa data kuantitatif dengan skala pengukuran nominal dan ordinal.⁵⁵ Dalam penelitian ini uji non-parametrik menggunakan uji rank bertanda wilcoxon.

Uji rank bertanda wilcoxon adalah prosedur pengujian hipotesis nol dengan dua median sama untuk membandingkan median tunggal dengan suatu nilai yang ditentukan atau pasangan median dari sampel yang sama-sama diuji. Langkah-langkah sebagai berikut:

1) Hipotesis

H_0 : terdapat perbedaan pada kinerja keuangan pemerintah Kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19

H_1 : Terdapat perbedaan pada kinerja keuangan pemerintah Kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19

2) Menentukan taraf signifikansi, taraf signifikansi pada penelitian ini 0,05

3) Daerah kritis

Jika signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika signifikansi $< 0,05$ maka H_1 ditolak

4) Menarik kesimpulan

⁵⁵ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Kota Metro

Awal mula Metro dibangun dari sebuah induk desa yang diberi nama Trimurjo. Nama desa trimurjo berganti menjadi nama Metro pada 9 Juni 1937. Seorang Kolonis mengatakan bahwa nama Metro berasal dari kata "Mitro" yang berarti keluarga, persaudaraan atau kumpulan kawan-kawan. Namun ada juga yang mengatakan Metro berasal dari kata "Metrerm" (Bahasa Belanda) yang berarti "Pusat atau Centrum" atau Central, yang di mana maksudnya itu merupakan pusat/sentral kegiatan karena memang letaknya itu berada di tengah-tengah. Adapun Kolonis yang lain juga mengatakan Metro mempunyai arti yang ganda, yaitu saudara persaudaraan dan tempat yang terletak di tengah-tengah antara Rancangpurwo (Pekalongan) dan Adipuro (Trimurjo).

Maksud awal dari pembukaan induk Desa baru ini untuk menampung sebagian dari Kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung koloni-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya. Dikarenakan perkembangan penduduk yang pesat, maka Metro dijadikan tempat kedudukan asisten wedana dan sebagai pusat pemerintahan Onder district Metro. Asisten wedana (Camat) yang pertama adalah Raden Mas Sudarto. Penggantian nama desa tersebut berdasarkan pada pertimbangan

letak daerah kolonisasi yang berada di tengah-tengah antara adipuro dengan Rancangpurwo.

2. Pemerintahan Kota Metro

Kota Metro sebagai pusat pemerintahan kecamatan Kota Metro dan ibukota Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif pada tanggal 14 Agustus 1986. Peresmian dilakukan pada tanggal 9 September 1987. Keinginan untuk menjadikan kota Metro sebagai daerah otonom bermula pada tahun 1968 berlanjut pada tahun 1970/1971. Harapan yang diinginkan akhirnya terpenuhi dengan diresmikannya Kotamadya Dati II Metro Berdasarkan UU No 12 tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan peraturan daerah Kota Metro No 11 tahun 2002, ditetapkan tanggal 9 Juni 1937 sebagai hari jadi Kota Metro. Pemerintahan Kota Metro sekarang dipimpin oleh Walikota yang bernama dr. H. Wahdi siradjuddin, Sp. OG (K) bersama Wakil Walikota Drs. H. Qomaru Zaman, MA

3. Wilayah Kota Metro

Kota Metro merupakan salah satu kota yang berada di wilayah provinsi Lampung yang secara geografis terletak pada posisi 105,170-105,190 bujur timur dan 5,60-5,80 lintang selatan. Kota Metro berjarak 45 km dari kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Provinsi Lampung. Kota Metro memiliki luas wilayah 68,74 km² atau 6874 Ha. Dengan jumlah penduduknya berdasarkan website resmi Disdukcapil Kota Metro sebanyak 174.551 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak

87.732 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 86.819 jiwa. Tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan. Mayoritas mata pencarian masyarakat Kota Metro adalah wirausaha atau pedagang.

B. Hasil Analisis Data

1. Analisis Indikator Rasio

Analisi kinerja keuangan BPKAD Kota Metro dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan BPKAD Kota Metro dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPKAD Kota Metro pada penelitian ini yaitu, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio DSCR. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Metro yang didapat dari BPKAD Kota Metro. Dari data tersebut dapat memberikan gambaran informasi mengenai kinerja keuangan Kota Metro. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah:

a. Rasio Kemandirian

Rumus untuk menghitung rasio kemandirian adalah:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman(Pendapatan Daerah)}}$$

Hasil dari perhitungan rasio kemandirian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Penghitungan Rasio Kemandirian

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	176.199.324.166	221.649.607.046
Pendapatan Transfer (Rp)	733.730.339.089	677.883.135.085
Pinjaman (Rp)	-	-
Rasio Kemandirian	0,24 atau 24%	0,33 atau 33%
Pola Hubungan	Instruktif	Konsultatif

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 0,24 atau 24% yang kemudian naik menjadi 0,33 atau 33%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 pendapatan kota Metro sebesar Rp. 176.199.324.166, kemudian pada tahun 2020 naik menjadi sebesar Rp. 221.649.607.046. PAD tersebut naik berasal dari pendapatan pajak daerah yang naik dari tahun 2019 sebesar Rp. 27.205.358.060 dan tahun 2020 sebesar 28.847.730.447, pendapatan retribusi daerah yang naik pada tahun 2019 sebesar 5.631.840.647 dan tahun 2020 sebesar Rp. 7.031.322.895, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan naik dari tahun 2019 sebesar 4.894.552.257 dan tahun 2020 sebesar 5.562.606.121, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang naik dari tahun 2019 sebesar 138.467.573.201. berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern masih cukup tinggi, namun begitu perlahan-lahan pemerintah Kota Metro mampu untuk meningkatkan kemandiriannya yang dibuktikan dari hasil kenaikan rasio kemandirian tersebut.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rumus untuk menghitung rasio efektivitas dan efisiensi adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

Hasil dari perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Realisasi PAD (Rp)	176.199.324.166	221.649.607.046
Anggaran PAD (Rp)	154.366.801.656	199.427.703.884
Rasio Efektivitas	1,14 atau 114%	1,11 atau 111%
Kriteria	Sangat Efektif	Sangat Efektif

Berdasarkan perhitungan yang terdapat di tabel tersebut menggambarkan rasio efektivitas pemerintah Kota Metro dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama PAD pada tahun anggaran 2019 sampai 2020 memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif di kisaran diatas >100%, sehingga hal tersebut perlu dipertahankan oleh pemerintah Kota Metro. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja keuangan pemerintah Kota Metro untuk rasio efektifitas PAD sebelum pandemi covid-19 pada tahun 2019 sebesar 1,14 atau 114% sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,11 atau 111% yang dimana keduanya masih dapat dikategori kedalam kriteria sangat efektif.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}$$

Hasil dari perhitungan rasio efisiensi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Efisiensi

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Biaya Pemungutan (Rp)	9.350.405.212	8.003.863.299
Realisasi PAD (Rp)	176.199.324.166	221.649.607.046
Rasio Efisiensi	0,053 atau 5,30%	0,036 atau 3,61%
Kriteria	Sangat Efisien	Sangat Efisien

Hasil pada tabel tersebut pada tahun 2019 yaitu 0,053 atau 5,30% sedangkan hasil Rasio Efektivitas di tahun 2020 yaitu 0,036 atau 3,61% yang berarti Pemerintah Kota Metro dapat dikatakan memiliki kinerja yang sangat efisien dalam hal merealisasikan PAD yang telah di rencanakan. Biaya pemungutan tersebut berasal dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Pada tahun 2019 belanja pegawai sebesar 6.057.666.239 dan pada tahun 2020 sebesar 5.915.546.216, sedangkan belanja barang dan jasa pada tahun 2019 sebesar 3.292.738.973 dan tahun 2020 sebesar 2.088.317.083.

c. Rasio Aktivitas

Rumus untuk menghitung rasio aktivitas adalah:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Hasil dari perhitungan rasio belanja operasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Belanja Operasional

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Belanja Operasi (Rp)	692.941.168.625	753.546.645.073
Belanja Daerah (Rp)	902.508.611.826	946.165.570.428
Rasio Belanja Operasional	0,76 atau 76%	0,79 atau 79%

Hasil dari perhitungan rasio belanja modal dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Belanja Modal

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Belanja Modal (Rp)	209.524.948.200	166.890.856.331
Belanja Daerah (Rp)	902.508.611.826	946.165.570.428
Rasio Belanja Modal	0,23 atau 23%	0,17 atau 17%

Berdasarkan perhitungan Tabel 4.4 rasio belanja operasi Pemerintah Kota Metro pada tahun anggaran 2019-2020 sebesar 0,76 atau 76% dan 0,79 atau 79%. Berdasarkan perhitungan Tabel 4.5 rasio belanja modal Pemerintah Kota Metro pada tahun anggaran 2019-2020 sebesar 0,23 atau 23% dan 0,17 atau 17%. Persentase tersebut mengalami penurunan yang terjadi karena anggaran belanja modal dialokasikan ke penanganan pandemi Covid-19.

Pada tabel 4.4 hasil belanja operasi didapatkan berdasarkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja pegawai pada tahun 2019 sebesar 364.231.245.098 dan pada tahun 2020 sebesar 430.864.751.826, belanja barang dan jasa pada tahun 2019 sebesar 317.687.319.425 dan

pada tahun 2020 sebesar 290.726.119.601, belanja hibah pada tahun 2019 sebesar 9.277.604.102 dan pada tahun 2020 sebesar 31.955.773.646, lalu belanja bantuan sosial pada tahun 2019 sebesar 1.745.000.000 namun pada tahun 2020 belanja bantuan sosial tidak ada.

Pada tabel 4.5 hasil belanja modal didapat berdasarkan belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja asset tetap lainnya. Belanja tanah pada tahun 2019 sebesar 179.904.600 dan tahun 2020 sebesar 19.989.400, belanja barang dan jasa pada tahun 2019 sebesar 63.998.548.818 dan tahun 2020 sebesar 47.086.721.191, belanja gedung dan bangunan pada tahun 2019 sebesar 67.260.194.688 dan pada tahun 2020 sebesar 62.600.149.854, belanja jalan, irigasi dan jaringan pada tahun 2019 sebesar 77.392.887.192 dan pada tahun 2020 sebesar 56.002.881.586, serta belanja asset tetap lainnya pada tahun 2019 sebesar 693.412.900 dan pada tahun 2020 sebesar 1.181.114.300.

d. Rasio Pertumbuhan

Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah:

$$\% \text{ Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_o}{P_o}$$

Dimana:

P_n = Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang di hitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan Daerah/PAD/ Belanja Modal/ Belanja Operasi yang di hitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Hasil dari perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Perhitungan Rasio Pertumbuhan

Keterangan	Tahun Anggaran		
	2018	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	132.202.276.039	176.199.324.166	221.649.607.046
Pertumbuhan PAD		0,33 atau 33,2%	0,25 atau 25,7%
Pendapatan Daerah (Rp)	850.862.998.519	927.116.733.837	917.969.390.317
Pertumbuhan Pendapatan Daerah		0,089 atau 8,96%	-0,0098 atau -0,98%
Belanja Operasi (Rp)	643.587.319.141	692.941.168.625	753.546.645.073
Pertumbuhan Belanja Operasi		0,076 atau 7,66 %	0,087 atau 8,74%
Belanja Modal (Rp)	224.461.297.229	209.524.948.200	166.890.856.331
Pertumbuhan Belanja Modal		-0,06 atau -6,65%	-0,20 atau -20,34%

Berdasarkan perhitungan pada tabel rasio pertumbuhan dari komponen pendapatan dan pengeluaran tahun 2019 mengalami pertumbuhan yang positif kecuali pada bagian belanja modal. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,33 atau 33,2%, rasio pertumbuhan pendapatan daerah sebesar 0,089 atau 8,96%, rasio pertumbuhan belanja operasi sebesar 0,076 atau 7,66%, sedangkan rasio pertumbuhan belanja modal yaitu -0,06 atau -6,65%. Sedangkan pada tahun 2020 rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,25 atau 25,7%, rasio pertumbuhan pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar -0,0098 atau -0,98%,

rasio pertumbuhan belanja operasi sebesar 0,087 atau 8,74%, sedangkan rasio pertumbuhan belanja modal yaitu -0,20 atau -20,34%.

e. Rasio DSCR

Rumus untuk menghitung rasio DSCR adalah:

$$DSCR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{\text{Total(Pokok Utang+Bunga+Biaya Pinjaman)}}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian Daerah dari bagi hasil pajak/bukan pajak

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib

Hasil dari perhitungan rasio DSCR dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Perhitungan Rasio DSCR

Keterangan	Tahun Anggaran	
	2019	2020
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	176.199.324.166	221.649.607.046
Dana Bagi Hasil Pajak	10.198.622.878	12.948.597.396
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.324.897.834	7.764.243.705
Dana Alokasi Umum	476.738.335.000	435.052.452.000
Belanja Pegawai	364.231.245.098	430.864.751.826
Pokok Utang	-	-
Belanja Bunga	-	-
Rasio DSCR		

Berdasarkan tabel diatas perhitungan rasio DSCR tidak lengkap sehingga perhitungan terkait kemampuan membayar kembali pinjaman yang dilakukan Pemerintah Kota Metro tidak memiliki hasil rasio.

2. Uji Normalitas

**Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas
One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.06611349
Most Extreme Differences	Absolute	.163
	Positive	.163
	Negative	-.134
Test Statistic		.163
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan pada output tabel diatas *One- Sampel Kolmogrov-Smirnov* test dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal, yang ditunjukkan dengan nilai signifikan sebesar 0,200 yakni lebih besar dari 0,05. maka dari analisis diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal .

3. Uji Hipotesis

Tabel 4.9 Hasil Uji Hipotesis Paired Sampel T Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	x-y	.02978	.06803	.02151	-.01889	.07845	1.384	9	.200

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 26 maka diperoleh nilai sig sebesar $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa

tidak terdapat perbedaan yang nyata antara kinerja keuangan pemerintah Kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19.

C. Pembahasan

1. Analisis Indikator Rasio

Bedasarkan hasil dari analisis indikator rasio yang meliputi rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan serta rasio DSCR. Rasio kemandirian terkait kemampuan keuangan pemerintah Kota Metro tergolong masih rendah dan pola hubungannya instruktif pada tahun 2019 namun pada tahun 2020 pola hubungannya naik menjadi konsultatif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 0,24 atau 24% yang kemudian naik menjadi 0,33 atau 33%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern masih cukup tinggi, namun perlahan pemerintah Kota Metro mampu untuk meningkatkan kemandiriannya yang dibuktikan dari hasil kenaikan rasio tersebut. Pada perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah Kota Metro sudah sangat baik walaupun kedua rasio tersebut mengalami sedikit penurunan yang dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19, namun walau begitu pemerintah Kota Metro masih bisa tetap mempertahankan ke efektivitasan dan ke efisiensiannya. Pada rasio aktivitas belanja operasional mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 0,76 atau 76% dan tahun 2020 sebesar 0,79 atau 79%, lalu rasio aktivitas

belanja modal mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,23 atau 23% dan tahun 2020 sebesar 0,17 atau 17%, hal tersebut terjadi dikarenakan pemerintah menyesuaikan dana dengan keadaan saat terjadi Pandemi Covid-19. Selanjutnya, rasio pertumbuhan pada tahun 2019 mengalami kenaikan kecuali belanja modal, pada tahun 2020 PAD dan belanja operasional mengalami kenaikan namun pendapatan daerah dan belanja modal mengalami penurunan. Sedangkan untuk rasio DSCR terkait kemampuan pemerintah Kota Metro untuk membayar pinjaman tidak memiliki rasio dikarenakan pemerintah Kota Metro tidak memiliki pinjaman yang harus dibayarkan.

2. Uji Hipotesis

Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji hipotesis *Paired Sampel T Test* yang menggunakan SPSS versi 26 dapat dilihat nilai sig yang diperoleh sebesar 0,200 yakni lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut didapat dari hasil-hasil rasio yang telah dihitung. Berdasarkan dari hasil perhitungan rasio-rasio tersebut memang tidak terdapat perbedaan hasil yang signifikan. Rata-rata naik turunnya rasio yang dihasilkan dalam perhitungan tersebut kurang dari 10%. Untuk mengetahui keabsahan dan menyakinkan dari perhitungan rasio tersebut maka dilakukannya uji *Paired Sampel T Test*. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang disimpulkan yaitu tidak terdapat perbedaan pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19. Hal tersebut sesuai dengan H_0 pada uji hipotesis.

Dari hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ichsanul Amal dan Puji Wibowo yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi pada penelitian sebelumnya tersebut pada rasio kemandirian mengalami penurunan yang cukup jauh walaupun masih terbilang aman dan masih mampu mempertahankan kemandiriannya, yang dikarenakan menurunnya PAD dari tahun 2019 ke tahun 2020 yang berdampak dari terjadinya Pandemi Covid-19. Hal tersebut cukup berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada Pemerintah Kota Metro yang dimana saat Pandemi Covid-19 rasio kemandirian naik yang dimana hal tersebut disebabkan oleh naiknya PAD pada saat itu, yang dimana hal tersebut cukup jarang terjadi pada saat itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang nyata atau tidak sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 pada kinerja Pemerintah Kota Metro. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diolah sehingga memperoleh hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hasil analisis indikator rasio pada Pemerintah Kota Metro menunjukkan bahwa rasiokemandirian masih tergolong rendah, rasio efektifitas dan efisiensi menunjukkan sudah sangat efektif dan efisien, rasio aktivitas pada belanja operasi mengalami kenaikan namun pada rasio belanja modal mengalami penurunan, rasio pertumbuhan pada PAD dan belanja operasi mengalami kenaikan sedangkan pada pendapatan daerah serta belanja modal mengalami penurunan, dan rasio DSCR tidak mempunyai hasil rasio dikarenakan pada Pemerintah Kota Metro tidak memiliki pinjaman. Hasil hipotesis dari penelitian ini berdasarkan dari uji paired sampel t-test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata pada kinerja keuangan Pemerintah Kota Metro sebelum dan saat pandemi covid-19.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data diatas, peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Metro diharapkan dapat lebih memaksimalkan potensi asli daerah terlebih pada pendapatan daerah sehingga mampu membuat Pemerintah Kota Metro dapat lebih mandiri sehingga tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dapat berkurang.
2. Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai kinerja keuangan pada pemerintah daerah terutama pada pemerintah Kota Metro. Hendaknya pula para peneliti selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnika, Mutia, Sugih Sutrisno Putra, dan Sudradjat. "Analisis Kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19." *indonesian accounting research journal* 1, no. 3 (2021): 493-503.
- Ariadi, Wa, dan Windi Jatmika. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Dimasa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 12 (2023): 11-15.
- Cantika Adinda Putri. "DPR: Perppu Pelebaran Defisit Di Atas 3% Bisa Langsung Jalan." *CNBC Indonesia*. Last modified 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200402115240-4-149330/dpr-perppu-pelebaran-defisit-di-atas-3-bisa-langsung-jalan>.
- Dedy Sasongko. "Kebijakan Fiskal Dan Moneter Menghadapi Dampak Covid-19." *Kementerian Keuangan*. Last modified 2020. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/Kebijakan-Fiskal-dan-Moneter-Mengadapi-Dampak-Covid-19.html>.
- Gemala, Nila, Aries Tanno, dan Rahmat Kurniawan. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Nilai Perusahaan Antara Pra Tax Amnesty Dengan Pasca Tax Amnesty Di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics dan Business* 6, no. 1 (2022): 69-77.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Harahap, Heri Faisal. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah." *Ekonomis: Journal of Economics dan Business* 4, no. 1 (2020): 34-38.
- Herawati, Helmi. "Pentingnya Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan." *Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ* 2, no. 1 (2019): 16-25.
- Huma DPRD Banyuwangi. "PAD Banyuwangi 2022 Turun 4,75 Persen, Komisi III Dorong Eksekutif Gali Potensi PAD Di 2023." *Filesatu*. Last modified 2023. Accessed June 21, 2023. <https://filesatu.co.id/pad-banyuwangi-2022-turun-475-persen-komisi-iii-dorong-eksekutif-gali-potensi-pad-di-2023/>.

- Ichlasul Amal, Muhammad, dan Puji Wibowo. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19." *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* 4, no. 1 (2022): 83-93.
- Karina Isna Irawan. "Hadapi Risiko, Defisit Anggaran Diperlebar." *Kompas*. Last modified 2020. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2020/02/28/hadapi-risiko-defisit-anggaran-diperlebar/>.
- Karina, Nisfi Nova, dan Puji Wibowo. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 14, no. 2 (2022): 146-167.
- Kartopawiro, Sardio, dan Yohanes Susanto. "Analisis Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya* 16, no. 4 (2018): 1-14.
- Komputer, Wahana. *Seri Panduan Praktis: SPSS 17 Untuk Pengelolaan Data Statistik*. Edited by Ari Pidekso. Semarang: Andi Offset, 2009.
- Mahmudi. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Pess Yogyakarta, 2011.
- Murni, Cici Dewi Sari. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 (Studi Terhadap Beberapa Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis)* 5, no. 29 (2020): 172-186.
- Mutiarasari, Kanya Anindita. "Pengertian Pandemi Covid-19, Statusnya Di Indonesia Diperpanjang Jokowi." *Detiknews*. Last modified 2022. Accessed July 3, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5881903/pengertian-pandemi-covid-19-statusnya-di-indonesia-diperpanjang-jokowi>.
- Nuryadi, Tutut Dewi Astuti, Endang Sri Utami, dan M. Budiantara. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media, 2017.
- Oryza A. Wirawan. "Pertumbuhan Ekonomi Jember Salip Banyuwangi." *Berita Jatim*. Last modified 2023. Accessed June 21, 2023. <https://beritajatim.com/sorotan/pertumbuhan-ekonomi-jember-salip-banyuwangi/>.
- Patarowo, Dede Hartanto, Risal Rinofah, dan Pristin Prima Sari. "Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan" 5, no. 1 (2022): 14-35.
- Puspita, Wulan Dri, dan Dyah Ani Pangastuti. "Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19." *Among Makarti* 15, no. 1 (2022): 90-104.

- Putra, Dwi Aditya. "72.983 Pekerja Kena PHK Selama Pandemi Covid-19." *Liputan 6*. Last modified 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19>.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintah Daerah : Kajian Teori, Hukum, Dan Aplikasinya*. Edited by Tarmizi. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Salim, Muhamad Nur. "Analisis Kinerja Keuangan Dan Ekonomi Pemerintah Daerah Sebelum Dan Setelah Pemekaran (Studi Kasus Pemekaran Di Papua)." *Indonesian Journal of Development Economics* 2, no. 2 (2019): 436-448.
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi SPSS Versi 17*. Edited by Fandy Hutari. 2nd ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sugiyono. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. 19th ed. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukma, Dian, Annie Mustika Putri, dan Muhammad Ahyaruddin. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah" 2, no. 1 (2021): 36-44.
- Sumarwoto. "Banyumas Bangkit Melalui Sektor Pariwisata." *Antaraneews*. Last modified 2022. Accessed June 21, 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3290779/banyumas-bangkit-melalui-sektor-pariwisata>.
- Trianto, Anton. "Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) TBK Tanjung Enim." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 03 (2017).
- "Anggaran Covid-19 Di Lampung Terserap 52%." *BPKAD Provinsi Lampung*. Last modified 2020. <https://bpkad.lampungprov.go.id/anggaran-covid-19-di-lampung-terserap-52-persen/>.
- "APBD 2020." *BPKAD Kota Metro*. <https://bpkad.metrokota.go.id/apbd-2020/>.
- "Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi Di Indonesia." *Kementerian Keuangan*. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/pengaruhcovid>.
- "Pertanyaan Jawaban Terkait COVID-19 Untuk Publik." *WHO*. Accessed June 26, 2023. [https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public#:~:text=Virus COVID-19 \(disebut juga,pemutakhiran jika temuan baru tersedia](https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public#:~:text=Virus COVID-19 (disebut juga,pemutakhiran jika temuan baru tersedia).

“Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).” *Kementerian Keuangan*. Accessed June 7, 2023. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen>.

“RAPBN TA 2022: Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural.” *Kementerian Keuangan*. Last modified 2021. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/IN/post/rapbn-ta-2022-pemulihan-ekonomi-dan-reformasi-struktural>.

“Tutup 2020, Positif Covid-19 Di RI 743.198, Meninggal 22.138.” *CNN Indonesia*. Last modified 2021. Accessed June 26, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210101081932-20-588397/tutup-2020-positif-covid-19-di-ri-743198-meninggal-22138>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Nomor : B-2757/In.28.1/J/TL.00/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Berwin Anggara, M.S.Ak., QRMA (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **YUNITA YUSUF**
NPM : 1903031050
Semester : 9 (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul : **ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO
SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 September 2023
Ketua Jurusan,



Northa Idaman M.M
NIP 19840820 201903 2 005

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO
SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Rumusan Masalah
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- F. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Pemerintah Daerah
 - 1. Pengertian Pemerintah Daerah
 - 2. Fungsi Pemerintah Daerah
 - 3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- B. Kinerja Keuangan
 - 1. Pengertian Kinerja Keuangan
 - 2. Rasio Kinerja Keuangan
- C. Laporan Keuangan
 - 1. Pengertian Laporan Keuangan
 - 2. Tujuan Laporan Keuangan
- D. Covid-19
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Hipotesis Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Rancangan Penelitian
- B. Definisi Operasional Variabel
- C. Populasi dan Sampel Penelitian
 - 1. Populasi
 - 2. Sampel
 - 3. Teknik Pengambilan Sampel
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Objek Penelitian
 - 1. Sejarah Kota Metro
 - 2. Pemerintahan Kota Metro
 - 3. Wilayah Kota Metro
- B. Hasil Analisis Data
- C. Pembahasan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

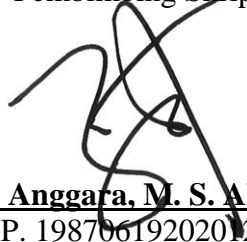
Metro, 11 September 2023
Penulis



Yunita Yusuf

NPM. 1903031050

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Berwin Anggara, M. S. Ak., ORMA
NIP. 198706192020121003

ALAT PENGUMPUL DATA

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

A. Dokumentasi

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019
2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

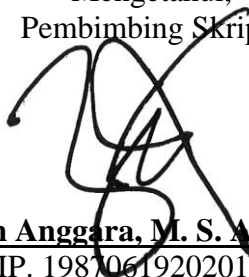
Metro, 11 September 2023
Penulis



Yunita Yusuf

NPM. 1903031050

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Berwin Anggara, M. S. Ak., ORMA
NIP. 198706192020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2785/In.28/D.1/TL.00/09/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2786/In.28/D.1/TL.01/09/2023, tanggal 12 September 2023 atas nama saudara:

Nama : **YUNITA YUSUF**
NPM : 1903031050
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Akuntansi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 September 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. AH. Nasution No. 7 Metro (Mal Pelayanan Publik)
Website: pmpstsp.metrokota.go.id / email: pmpstspkotametro@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN (SI-P)

Nomor : 503/139/SI-P/D-15/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro, memberikan izin kepada:

Nama Peneliti : **YUNITA YUSUF**
Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : 1903031050
Alamat Peneliti : JL. IMAM BONJOL GG. JAYA SINGA RT. 030 RW. 007 KEL. HADIMULYO BARAT KEC. METRO PUSAT KOTA METRO

Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO

SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Tujuan Penelitian : MENGANALISA KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA METRO SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Lokasi Penelitian : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA METRO

Masa Berlaku Izin : 20 Desember 2023

Ketentuan:

1. Surat izin penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Peneliti memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**RETRIBUSI
GRATIS**



Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 20 September 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



DENY SANJAYA, S.T., M.T.

Pembina

NIP. 19840101 200902 1 004

Tembusan

1. Walikota Metro;
2. Kepala Badan KESBANGPOL Kota Metro;
3. Pertinggal.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1442/In.28/S/U.1/OT.01/12/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : YUNITA YUSUF
NPM : 1903031050
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1903031050

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 14 Desember 2023

Kepala Perpustakaan



Asad
Dr. Asad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunita Yusuf Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi
NPM : 1903031050 Semester/TA : 7/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	JENIN/21-11-2022	<ul style="list-style-type: none">- Membahas novelty penelitian.- Membahas kemungkinan permasalahan analisis uji beda pada penelitian- Uji beda pra + pasca 40 Ciptakar.	
2.	RABU/4-1-2022	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki data dengan pola CBM.- Cerybaya' dgn kerta relevan.- Cerybaya' dgn artikel-artikel terbita asing.- perbaiki typo	

Dosen Pembimbing,

Berwin Anggara, M. S. Ak., ORMA
NIP. 198706192020121003

Mahasiswa ybs,

Yunita Yusuf
NPM. 1903031050



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunita Yusuf Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi
NPM : 1903031050 Semester/TA : 8/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27/3 '23	Bab 1. Latar belakang & kondisi tenaga keuangan	
	31/3 '23	Bab I latar belakang Catatan = tambahan penelitian sebelumnya yang mendukung ide penelitian	
	5/4 '23	Bab I. Latar belakang catatan = - Hubungan DBH terhadap tenaga keuangan - korelasi antara Ull Kkpd & tenaga keuangan - perapihan	
	13/4 '23		
	22/5 '23		

Dosen Pembimbing,

Berwin Anggara, M. S. Ak., QRMA
NIP. 198706192020121003

Mahasiswa ybs,

Yunita Yusuf
NPM. 1903031050







**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunita Yusuf Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi
NPM : 1903031050 Semester/TA : 8/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25-5-23	Revisi Bab I - Data App. n.	
	29-5-2023		
	08-06-2023		
	16-06-2023	- revisi foto cover dan pen terhadap BAB. sample : Pantes Banyuwangi - Layout Bab I	

Dosen Pembimbing,



Berwin Anggara, M. S. Ak., ORMA
NIP. 198706192020121003

Mahasiswa ybs,



Yunita Yusuf
NPM. 1903031050



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunita Yusuf Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi
NPM : 1903031050 Semester/TA : 8/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	27-06-23	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki semua ton- Perbaiki hipotesis- perbaiki konsep pida	
2	03-07-2023	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki Bab II- Teori' pemat' mnt.- Teori' cont.- pemat' pemat'- pemat' footnote.- pemat' sub bab.	

Dosen Pembimbing,

Berwin Anggara, M. S. Ak., QRMA
NIP. 198706192020121003

Mahasiswa ybs,

Yunita Yusuf
NPM. 1903031050



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunita Yusuf Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi
NPM : 1903031050 Semester/TA : 8/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	4-7-2023	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki tata penulisan paragraf- perbaiki tata penulisan huruf.- Lembar Ref II	
2.	10-07-2023	<ul style="list-style-type: none">- perbaiki diry & ops word- perbaiki alat uji	

Dosen Pembimbing,

Berwin Anggara, M. S. Ak., ORMA
NIP. 198706192020121003

Mahasiswa ybs,

Yunita Yusuf
NPM. 1903031050






**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunita Yusuf Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi
NPM : 1903031050 Semester/TA : 8/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17-7-2023		
	26-7-2023		
	27-7-2023	Acc. seminar proposal	

Dosen Pembimbing,



Berwin Anggara, M. S. Ak., QRMA
NIP. 198706192020121003

Mahasiswa ybs,



Yunita Yusuf
NPM. 1903031050






**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) JURAI SIWO METRO**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yunita Yusuf Fakultas/Jurusan : FEBI /Akuntansi
NPM : 1903031050 Semester/TA : 9/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28/11 2023.		
	11/12 2023		
	12/12 2023	Peretujui Sembah	

Dosen Pembimbing,



Berwin Anggara, M. S. Ak., ORMA
NIP. 198706192020121003

Mahasiswa ybs,



Yunita Yusuf
NPM. 1903031050

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Peneliti bernama Yunita Yusuf, lahir di Metro pada tanggal 22 Januari 2002. Anak ketiga dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Bal Yusuf dan Ibu Okta Berti.

Latar belakang Pendidikan peneliti tempuh pada jenjang TK Kartika selesai pada tahun 2007, melanjutkan sekolah dasar pada SD Negeri 5 Metro pusat yang selesai pada tahun 2013, lalu sekolah menengah pertama di MTs. Muhammadiyah Metro dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Metro dan lulus pada tahun 2019. Kemudian, peneliti melanjutkan Pendidikan di IAIN Metro pada tahun 2019 dengan mengambil jurusan Akuntansi Syari'ah. Yang menjadi harapan peneliti saat ini adalah dapat mewujudkan cita-cita peneliti dan mendapatkan pekerjaan yang di impikan peneliti.